

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 31 Desember 2014

Subyek : Air

Hal : 23

## BPLS MULAI SEDOT AIR

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Selasa (30/12), mulai menyedot air di kolam penampungan di titik 81 Desa Glagaharum, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Penyedotan dilakukan karena kolam penampungan lumpur Lapindo hampir meluber gara-gara volume air penuh akibat guyuran hujan hampir sebulan.

Permukaan air hampir menyentuh permukaan tanggul karena hanya berjarak 30 sentimeter. Apabila hujan tidak deras sekalipun, dikhawatirkan kolam akan penuh. Luberan lumpur berpotensi mengenai permukiman warga di Desa Glagaharum dan Desa Sentul. Permukiman itu cukup padat dengan jumlah rumah ratusan unit dan dihuni ratusan jiwa penduduk. Dwinanto Hesti Prasetyo dari Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengatakan, penanggulangan lumpur Lapindo di kolam Glagaharum dilakukan dengan mengerahkan satu mesin pompa untuk menyedot air. Selanjutnya, air itu dialirkan ke kolam penampungan di titik 42 Desa Besuki, Porong.

"Pemompaan untuk mengurangi volume air sehingga tidak meluber keluar tanggul. Di kolam titik 42, air akan digunakan untuk mengaduk lumpur yang mengendap supaya bisa dialirkan ke Kali Porong lanjut ke laut," kata Dwinanto.

### Kendala

Penanggulangan kolam Glagaharum sebenarnya sudah lama direncanakan. Tujuan semula untuk mengantisipasi tanggul jebol karena permukaannya sudah turun hingga 60 sentimeter. BPLS khawatir, penurunan permukaan tanggul semakin parah sehingga berdampak pada jebolnya tanggul. Apabila tanggul jebol, lumpur dalam volume besar akan mengalir deras tak terbendung dan menenggelamkan permukiman warga. "Kami ingin mengantisipasi agar peristiwa tahun 2010 tidak terulang. Saat itu, tanggul mengalami penurunan drastis hingga 3 meter hanya dalam waktu semalam. Akibatnya, lumpur meluber hingga Desa Sentul," ujar Dwinanto. Upaya penanggulangan saat itu terkendala oleh blokade yang dilakukan warga korban lumpur. Mereka menutup tanggul titik 42 sehingga BPLS tidak bisa mengalirkan air dari kolam penampungan 81 Glagaharum. Belakangan, upaya komunikasi dengan warga mulai membaik. Mereka bersikap lunak dan mengizinkan BPLS bekerja. Namun, persoalan kembali menghadang dan kali ini sifatnya teknis. Akibat diblokade warga selama berbulan-bulan, peralatan BPLS banyak yang rusak karena tidak dirawat dengan baik. Dari dua mesin pompa yang dipakai untuk menyedot air, hanya satu pompa yang dapat dioperasikan.

"Akibatnya, setelah satu hari dipompa, volume air surut, tetapi kurang maksimal. Permukaan air turun 10-15 sentimeter," ucap Dwinanto. Selain menangani kolam titik 81, BPLS juga terus melanjutkan pembangunan tanggul baru di titik 73 Desa Kedungbendo, Tanggulangin. Saat ini panjang tanggul mencapai 800 meter dari rencana pembangunan sepanjang 1,7 kilometer dengan lebar 15 meter dan tinggi 5 meter.

### Posko pengungsi

Kepala Desa Gempolsari Abdul Haris mengatakan, posko pengungsian warga korban lumpur di balai desa tetap dibuka karena musim hujan belum berakhir. Bahkan, puncak hujan diprediksi akan terjadi Januari atau Februari 2015. "Kondisi endapan lumpur di rumah warga juga masih tinggi sehingga rumah belum maksimal untuk ditinggali. Bahkan, banjir masih mengancam setiap hujan mengguyur," kata Abdul Haris. Mesin pompa bergerak milik BPLS masih disiagakan di permukiman warga. Namun, mesin itu tidak bisa menyedot lumpur, hanya menyedot air yang bercampur lumpur dengan kadar tertentu. Akibatnya, warga tetap harus membersihkan lumpur secara manual. Ganti rugi

Warga korban lumpur sangat berharap pembayaran sisa ganti rugi segera cair supaya mereka bisa mencari tempat tinggal baru yang layak huni. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan presiden sebagai payung hukum keputusan pemerintah untuk melakukan penalganan pembayaran karena PT Lapindo Brantas mengalami kesulitan keuangan.

"Kami meminta pembayaran tidak berbelit supaya uangnya cepat diterima warga. Kami sudah lelah karena menunggu selama hampir sembilan bulan," ujar Suwadi (85), warga korban lumpur dari Desa Kalitengah.

Presiden Joko Widodo memutuskan menalangi pembayaran sisa ganti rugi senilai Rp 781 miliar dengan berkas sebanyak 3.337 bidang. Untuk mendapatkan dana talangan itu, Lapindo harus menyerahkan aset 9.900 bidang tanah yang sudah dibayar atau senilai Rp 3,03 triliun sebagai kolateral. (NIK).